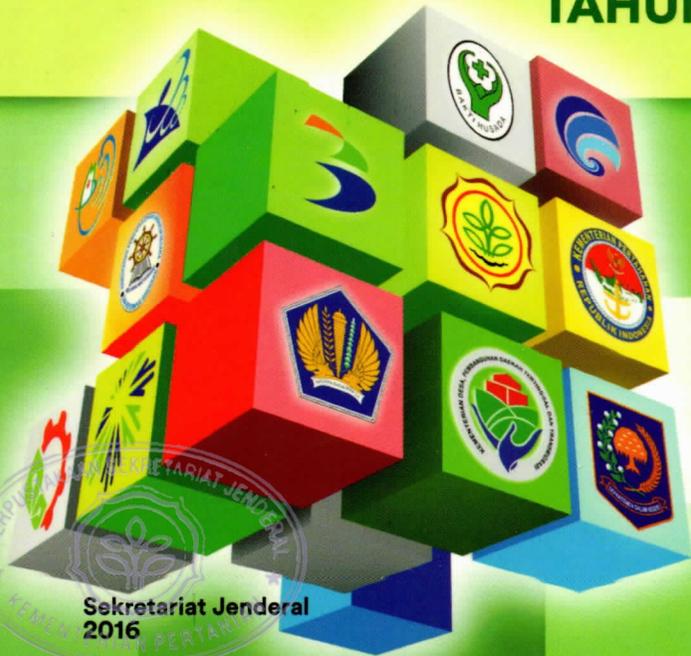




**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



DUKUNGAN SEKTOR LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019



**Sekretariat Jenderal
2016**



DUKUNGAN SEKTOR LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019





Ruang lingkup pembangunan pertanian secara geografis sangat luas melintas batas-batas wilayah administratif. Ruang lingkup pemangku kepentingan juga beragam meliputi aparaturn pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga penggerak swadaya masyarakat serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani.

Di sisi pemerintahan, pembangunan pertanian yang berada instansi lintas sektoral harus dapat dioptimalkan dengan menghilangkan adanya kebijakan yang saling bertentangan atau terdapat perilaku pemangku kepentingan yang tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus bersifat operasional, sehingga rancangan kebijakan harus diketahui sejak awal dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya tentunya akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan dibawah kewenangan Kemeterian Pertanian. Untuk itulah diperlukan dukungan yang diharapkan dari instansi lain.

Pemerintah Daerah

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Penerbitan Peraturan Daerah, termasuk diantaranya peraturan terkait RTRW;
- b. Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan, pengembangan pada penggembalaan dan hijau makanan ternak;
- c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian oleh Pemprov; Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan pengembangan kawasan pertanian;
- e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.



Kementerian Dalam Negeri

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk pertanian;
- b. Mendorong penerbitan Perda menindaklanjuti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 4 PP turunannya;
- c. Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah pengembangan potensi desa di sektor pertanian dan industri di pedesaan berbahan baku hasil pertanian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

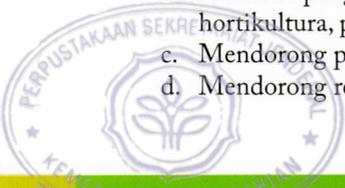
diperlukan dukungan antara lain :

- a. Revitalisasi infrastruktur jaringan jalan produksi, irigasi primer dan sekunder di wilayah sentra produksi;
- b. Revitalisasi kelembagaan pengelola air/mantri air, waduk dan embung besar di daerah rawan air.

Kementerian Perindustrian

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian;
- b. Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
- c. Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis kawasan pertanian;
- d. Mendorong revitalisasi pabrik gula, revitalisasi penggilingan padi serta penguatan industri pakan.



Kementerian Perdagangan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Penetapan harga dan kelancaran distribusi produk pertanian;
- b. Pengaturan importasi sapi bakalan dan daging serta produk hortikultura;
- c. Kebijakan penataan kerjasama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor;
- d. Pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor untuk mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi ekspor;
- e. Promosi cinta produk pertanian nusantara serta promosi ekspor;
- f. Perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani;
- g. Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana stok manajemen;
- h. Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk di tingkat usaha tani.

Kementerian Perhubungan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Adanya ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional;
- b. Perbaikan moda transportasi dan distribusi ternak berupa kereta, kapal dan prasarana pelabuhan.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

diperlukan dukungan antara lain :

Menjadikan sentra komoditas pertanian utama sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

diperlukan dukungan antara lain :

Kebijakan penataan, pengembangan kelembagaan dan usaha tani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian.

Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Dukungan bagi pengembangan sentra produksi oleh BUMN;
- b. Pembinaan terhadap BUMN produsen pupuk dan benih menjadi lebih profesional dan efisien;
- c. Revitalisasi pabrik gula

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian;



- b. Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui tumpangsari (terutama kedelai dan tebu) di Hutan Produksi Konversi dan hutan kemasyarakatan;
- c. Pemeliharaan plasma nutfah pertanian in-situ;
- d. Rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan serta kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian;
- e. Jaminan dan ketersediaan dan status lahan untuk pemanfaatan pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;
- b. Penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan;
- c. Dukungan perluasan lahan bagi pengembangan kawasan pertanian redistribusi lahan terlantar;
- d. Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak.

Kementerian Keuangan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Penyediaan dana untuk tenaga lapangan, penyuluh pertanian, pengawas benih, petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional lainnya;
 - b. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian (Skim Khusus Pembiayaan Pertanian);
- terpaduan pemeriksaan produk pertanian di Bandara dan Pelabuhan (Bea Cukai dan Karantina Pertanian);
mendorong dan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.



Kementerian Kelautan dan Perikanan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan untuk pelestarian sumber daya air di darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan;
- b. Pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari/mina padi dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan;
- b. Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian

Kementerian Agama

diperlukan dukungan antara lain :

Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama.



Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah secara dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri;
- b. Pembinaan SMK pertanian menjadi sekolah unggulan pencetak tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan budidaya pertanian;
- c. Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Pengembangan konsorsium penelitian agro-nanoteknologi untuk meningkatkan produktivitas dan varietas unggul tanaman dan ternak;
- b. Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan Tinggi dalam pendampingan kelompok petani.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Sosialisasi program pencapaian swasembada pangan;
- b. Penyediaan jaringan komunikasi dan informasi bagi balai penyuluhan di Kecamatan serta kantor layanan perkarantinaan di daerah perbatasan dan pelabuhan terpencil.



Kementerian Kesehatan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan membina dan melindungi petani / peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis;
- b. Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan produk pertanian yang tidak halal.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

diperlukan dukungan antara lain :

Penambahan tenaga lapangan POPT-PHP, Penyuluh Pertanian, medis dan paramedis kesehatan hewan, pengawasan benih dan petugas Karantina Pertanian.

Kementerian Pariwisata

diperlukan dukungan antara lain :

Mendorong dan membina agrowisata dan industri kreatif berbahan baku pertanian.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia)

diperlukan dukungan antara lain :

Mendukung suasana yang kondusif jalannya kegiatan pertanian di pedesaan tanpa kendala yang diakibatkan oleh pemalsuan pupuk, penyaluran pupuk dan benih yang terhambat, konflik sosial dan penyerobotan lahan usaha serta membantu rehabilitasi lahan pada daerah pasca bencana alam.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan makro untuk sector pertanian;
- b. Koordinator lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan pangan nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

diperlukan dukungan antara lain :

Kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian.

Perum Bulog

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan strategis;
- b. Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya;
- c. Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditi

Perbankan

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Pengembangan yang lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian;



- b. Merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian;
- c. Kebijakan perbankan yang lebih pro pertanian

Perguruan Tinggi

diperlukan dukungan antara lain :

- a. Pengembangan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan;
- b. Peningkatan Pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat.

- ***Sumber bahan : Permentan Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015, tentang Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.***
- ***di gandakan oleh : Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.***



www.pertanian.go.id

Biro Hubungan Masyarakat
dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung A
Ragunan, Jakarta 12550

